



PUTUSAN

Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKab.Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. FAHRURROZI, SH dan SINTA MARTAWATI SOEDIBYO, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Citarum No. 19 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4564/Kuasa/XI/2024 tanggal 06 Nopember 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Surabaya - 60185 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi, pada tanggal 05 Desember 1983 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami - istri dan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di XXX, Kab. Banyuwangi dan kemudian akhir tahun 1987 berpindah kediaman di XXX, Kota Surabaya – 60185 sampai sekarang ;

3. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan/anak 4 (empat) orang, yang pertama bernama XXX, sekarang berusia 40 tahun, belum menikah, kedua bernama XXX, 38 tahun dan telah menikah, ketiga bernama XXX, 34 tahun dan sudah menikah, yang ke-empat bernama XXX, 31 tahun dan sudah menikah ;

4. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan nafkah lahir dan kalau cekcok Tergugat mengusir Penggugat, beberapa kali melakukan KDRT berat kepada Penggugat sampai menimbulkan luka lebam-lebam di beberapa bagian tubuh Penggugat. Dan sejak tahu 2018 setelah Tergugat mengucapkan Talaq kepada Penggugat serta Tergugat melakukan KDRT berat tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan kayaknya suami istri lagi ;

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi percekocokan dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan tidak saling menghiraukan meskipun tinggal dalam satu atap. Dan puncaknya pada awal tahun 2024 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan kos disekitaran Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi ;

6. Bahwa kemudian baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat yang mengalami permasalahan rumah tangganya ;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan dengan alasan-alasan sebagai mana tersebut diatas, ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 6 (enam) tahun dan pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya serta Tergugat telah mengucapkan talaq kepada Penggugat maka Penggugat berkehendak untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat ;

8. Bahwa segala kejadian yang dialami oleh Penggugat dalam kehidupan rumah-tangganya bersama Tertergugat telah dijadikan renungan dan pertimbangan yang mendalam oleh Penggugat, serta dari kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga sampailah pada kesimpulan dan keputusannya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berdampingan dengan Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan yang tidak berkejelasan ini, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus/berakhir karena Talaq ;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil dan untuk mengoptimal upaya perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 20 November 2024 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 26 November 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Desember 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ; Tergugat beberapa kali telah melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;

2. **XXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ; Tergugat beberapa kali telah melakukan KDRT kepada Penggugat, akhirnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan perdamaian lebih dahulu melalui proses mediasi dengan mediator bernama **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI** dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 20 November 2024 dan Mediator telah melaporkan hasil mediasinya pada tanggal 26 November 2024 yang isinya menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi berhasil sebagian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya pada setiap persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ; Tergugat beberapa kali telah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sebab Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum sehingga dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti perkawinannya dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 05

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983, dan tercatat secara resmi pada tanggal 05 Desember 1983, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dari surat gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 1983 dan masih terikat perkawinan hingga sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, relevan dengan identitas Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 05 Desember 1983 sampai sekarang serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau berkepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya menurut agamanya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan serta antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Desember 1983 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2018 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ; Tergugat beberapa kali telah melakukan KDRT kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka gugatan perceraian tersebut harus memenuhi unsur-unsur perceraian yaitu adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2018 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ; Tergugat beberapa kali telah melakukan KDRT kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali karenanya alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut telah sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ لَّيْلَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لَهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan tersebut dalam rumah tangganya apalagi Penggugat telah berkeras hati tetap untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) ;

Menimbang, bahwa apabila ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak memberikan kemaslahatan / manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suami istri sebab baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak memperoleh hak-haknya serta akan menimbulkan memudharatan / kemafsadatan dan hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam bahwa

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana termuat dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan, maka harus dicarikan solusinya dan salah satunya adalah menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً
بَاطِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat(XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 1.316.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.586.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).